

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dipandang sebagai suatu proses untuk membina dan mengantarkan peserta didik agar dapat menemukan kemandiriannya, sehingga pendidikan menjadi suatu aktivitas pendewasaan diri seseorang. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Batasan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses kegiatan untuk mentransformasikan nilai-nilai kepribadian dari segenap komponen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang memuat gambaran tentang sistem nilai, keluhuran, kebenaran, dan keindahan dalam kehidupan. Hal ini selaras dengan tujuan Pendidikan Nasional yang diarahkan pada berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 2).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sistem Pendidikan Nasional dibangun dalam kerangka dasar yang digali dari akar budaya dan falsafah

bangsa dengan menitikberatkan pada persaingan global dalam peradaban bangsa dan dunia. Terlebih lagi, Indonesia saat ini berada di tengah-tengah persaingan global, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun pendidikan dengan dimulainya AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan AFLA (*Asean Free Labour Area*) pada tahun 2003. Sehingga setiap individu bangsa Indonesia harus memiliki keahlian dan keterampilan yang mampu bersaing dengan bangsa lain, khususnya dalam dunia kerja. Hal itu baru dapat terwujud apabila kualitas pendidikan yang diterapkan telah mampu mencapai tujuannya secara optimal.

Relevansi kualitas pendidikan dengan kehidupan masyarakat secara global, merupakan persoalan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang menuntut perhatian dan penanganan serius dari seluruh komponen bangsa. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang diselenggarakan secara terencana, teratur, terarah, dan berkesinambungan.

Berbagai upaya ke arah itu terus dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum, peningkatan profesionalisme guru, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi persyaratan teknis pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan relevansi kualitas pendidikan ini antara lain dilaksanakan melalui upaya perubahan kurikulum dan metode mengajar, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan buku sumber belajar, peningkatan sumber daya manusia (khususnya guru), serta pengembangan manajemen penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pengembangan dalam aspek manajemen pendidikan dibakukan melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 1).

Di samping itu, kualitas pendidikan dipengaruhi pula oleh sistem pengelolaan pendidikan di sekolah serta kinerja guru. Sistem pengelolaan pendidikan di sekolah dilandasi oleh visi dan misi sekolah yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan persekolahan dalam hal ini adalah menjamin kompetensi minimal dalam keterampilan dan pemahaman yang telah ditentukan bagi semua anak. Hal ini menuntut sekolah untuk memiliki kemampuan dalam menyusun rencana serta melaksanakan proses pengembangan sumber daya manusia atau personal sekolah, termasuk peserta didiknya.

Sekolah harus memiliki kinerja yang mampu menunjukkan peningkatan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dalam hal ini, kinerja sekolah berhubungan erat dengan pemenuhan sasaran individu dan akan memberikan sumbangan kepada sasaran organisasi, karena itu menjadi tugas penting bagi pihak penyelenggara sekolah untuk merumuskan serta menerapkan mekanisme kinerja yang tepat serta terselenggaranya manajemen yang efektif, termasuk dalam hal komunikasi organisasi dan perilaku kepemimpinan.

Penyelenggaraan manajemen sekolah tidak dapat dipisahkan dari perilaku kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah dalam menjalankan perannya sebagai seorang “*top leader*”. Hal ini disebabkan oleh adanya keterikatan yang kuat antara model kepemimpinan (*leadership model*) yang diterapkan oleh kepala sekolah dengan efektivitas proses pendidikan di sekolah secara keseluruhan (Glatthorn, 2000). Pernyataan tersebut pada dasarnya berakar pada konsep kepemimpinan pendidikan yang bermuara pada pembentukan dan pengembangan potensi sumber daya manusia (warga sekolah) melalui pemanfaatan sumber daya organisasi yang efektif serta pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan. Pembentukan dan pengembangan potensi sumber daya manusia di sekolah ini dapat berlangsung dengan baik apabila ditunjang oleh perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang handal dan sistem komunikasi organisasi yang efektif.

Kontribusi komunikasi organisasi terhadap pengembangan potensi sumber daya manusia dalam suatu sekolah sebagaimana dikemukakan tadi memegang peranan yang sangat penting, baik komunikasi secara vertikal maupun horizontal, komunikasi verbal maupun non verbal. Berkenaan dengan hal tersebut, Robbins (2006:391) mengemukakan bahwa, “Riset menunjukan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat suksesnya kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Seseorang yang tidak dapat berkomunikasi dan terisolir dari sesamanya akan mengakibatkan gangguan kejiwaan”.

Sementara itu, guru sebagai salah satu komponen tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat vital dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah. Guru dalam hal ini memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Tugas guru bukan hanya sebatas mentransfer ilmu dan pengetahuan serta seperangkat keterampilan teknis mengajar peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Namun lebih dari itu, seorang guru harus mampu membimbing, mengembangkan potensi, serta memobilisasi peserta didik dalam belajar untuk dapat berkembang lebih optimal.

Sehingga dapat dikatakan bahwa guru merupakan titik sentral dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Perhatian terhadap kualitas dan kompetensi guru ini diberikan pemerintah melalui penetapan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi (UU No. 14 tahun 2005). Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kualitas kinerja sebuah organisasi tidak luput dari kompetensi pimpinan organisasi yang bersangkutan, demikian pula halnya dengan organisasi sekolah. Keberhasilan pencapaian tujuan sekolah dapat terwujud apabila manajemen sekolah dikelola secara tepat oleh pemimpin yang tepat pula.

Kompetensi kepala sekolah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah belum cukup untuk

menjamin keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Karena itu perlu ditambah dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah. Mengingat dalam pengelolaan satuan pendidikan, kepala sekolah mempunyai kedudukan yang strategis dalam mengembangkan sumber daya sekolah, terutama memberdayakan guru dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dalam memberdayakan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan sekolah khususnya dan tujuan pendidikan pada umumnya. Berkaitan dengan pendelegasian wewenang kepada kepala sekolah, agar wewenang yang diberikan berjalan dengan baik, maka diperlukan kepala sekolah yang kompeten dalam menjalankan program-program sekolah termasuk segala wewenang yang dilimpahkan untuk mengambil keputusan tentang pemanfaatan sumber daya sekolah dan kerja sama dengan masyarakat.

Pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan kepada sekolah dalam menjalankan tugas sebagai administrator tidak dapat dilepaskan dengan kompetensi manajerial yaitu, *conceptual skill, human skill, technical skill and design skill* (Rohiat 2008). Keseluruhan kompetensi tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam organisasi sekolah apabila dalam organisasi tersebut berlangsung komunikasi yang efektif. Pentingnya komunikasi dalam organisasi ini sesuai dengan pendapat Kochler dalam Sumirat (2002:22) bahwa, faktor komunikasi ikut serta mempengaruhi

efektivitas antara lain karena komunikasi dilaksanakan untuk menggerakkan aktivitas organisasi seperti halnya oksigen yang digunakan manusia demi kehidupan.

Dengan memperhatikan konsep-konsep tadi, dapatlah kita menilai keberadaan dan kondisi kualitas pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan di negara kita. Memperhatikan kondisi kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, tampak adanya suatu fenomena yang menunjukkan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Hal ini terungkap dari pernyataan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, bahwa jumlah siswa lulusan tingkat SMP yang tak melanjutkan ke tingkat SMA masih sangat besar. Tiap tahunnya, dari sekitar 3,5 juta siswa di tingkat SMP, sekitar 1,2 juta siswa tercatat tidak melanjutkan ke SMA (Kompas 14/9/2012).

Rendahnya minat untuk melanjutkan ke SMA ini sungguh sangat memperhatikan semua pihak. Hal ini pada umumnya banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan atau di pelosok daerah yang tergolong terpencil. Meskipun pemerintah telah memberikan sosialisasi tentang pendidikan, tetapi masih ada sebagian anak terpaksa tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Demikian pula halnya dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta dinilai gagal mengentaskan wajib belajar 12 tahun. Pasalnya, tahun 2010 tercatat 2.543 siswa/siswi

lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA (Pos Kota, 10/7/2010)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Purwakarta, khususnya di SMP-SMP Negeri, belum sepenuhnya efektif dalam melaksanakan program sekolah yang telah direncanakan dari mulai input, proses, hingga output. SMP yang ada di Kabupaten Purwakarta belum menunjukkan mutu lulusan yang diharapkan oleh masyarakat. Dampak yang muncul dari belum efektifnya pengelolaan sistem organisasi sekolah yang terjadi pada SMP-SMP di Kabupaten Purwakarta ini berimbas pada rendahnya kualitas pengelolaan sekolah, seperti ketidaksesuaian antara rencana dengan program sekolah, keputusan yang tidak didukung oleh semua komponen sekolah, serta keputusan tidak menitikberatkan pada aspirasi yang berkepentingan (*stakeholders*).

Hal-hal yang bersifat kasuistik di SMP-SMP Negeri tersebut disebabkan karena faktor perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang terbatas dan pola komunikasi organisasi yang kurang efektif, disamping faktor-faktor lainnya yang secara sistematis berpengaruh untuk perkembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Purwakarta.

Bertitik tolak dari keseluruhan uraian tadi, tampak adanya fenomena yang sangat menarik dan dipandang perlu mengkajian yang mendalam, terutama dalam aspek komunikasi organisasi sekolah dan perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki peranan vital dalam mewujudkan dan meningkatkan efektivitas kinerja sekolah yang

bersangkutan, sehingga pencapaian tujuan sekolah khususnya dan tujuan pendidikan umumnya, serta peningkatan kualitas pendidikan dapat terwujud secara optimal.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam pra observasi pada lokasi penelitian (awal tahun 2012), penulis mendapatkan informasi yang dapat mengidentifikasi bahwa efektifitas kinerja sekolah pada tingkat SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta belum dilaksanakan secara optimal. Kenyataan ini tampak dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2008 hingga 2011 yang hanya mencapai rata-rata peningkatan 0,43 % per tahunnya. Sementara itu, dilihat dari kondisi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakatnya hanya mencapai rata-rata 7 tahun, itu berarti tingkat pendidikan penduduknya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (Tabel 1.1).

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta

IPM	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Angka Harapan Hidup	66,48	66,77	67,08	67,36
Pendidikan				
- Angka Melek Huruf (%)	95,59	95,65	95,71	95,75
- Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,00	7,12	7,42	7,56
Indek Pembangunan Manusia	70,31	70,70	71,17	71,61

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, 2012.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut berarti :

- a. Kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan masih relatif rendah. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah maupun para penyelenggara pendidikan persekolahan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi masyarakatnya.
- b. Peran manajemen sekolah yang dalam hal ini menjadi kewenangan kepala sekolah untuk mampu menciptakan sistem dan mekanisme organisasi sekolah yang sesuai dengan tuntutan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Belum terlaksananya komunikasi organisasi yang baik, hal ini tampak dari interaksi antara atasan dan bawahan dalam setiap penyampaian pesan atau informasi yang terjadi dalam organisasi.
- d. Belum terciptanya perilaku kepemimpinan kepala sekolah sesuai dengan tahapan-tahapan yang konsisten dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan organisasi sekolah
- e. Lemahnya komunikasi yang terbentuk, menjadi salah satu penyebab utama tidak dapat terselenggaranya kinerja sekolah yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara efektif.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada fakta yang teridentifikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas kinerja sekolah bukanlah suatu faktor yang berdiri sendiri, melainkan akan bergantung pada sejumlah variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel tersebut sangat variatif, namun

dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada variabel yang secara signifikan berkaitan dengan efektivitas kinerja sekolah yaitu komunikasi organisasi dan perilaku kepemimpinan kepala sekolah.

Dengan demikian, masalah yang ditelaah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi empirik komunikasi organisasi di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta?
- b. Bagaimana kondisi empirik perilaku kepemimpinan kepala sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta?
- c. Bagaimana kondisi empirik efektivitas kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta?
- d. Seberapa besar kontribusi antara komunikasi organisasi dengan efektivitas kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta?
- e. Seberapa besar kontribusi antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan efektivitas kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta?
- f. Seberapa besar kontribusi antara komunikasi organisasi dan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan efektivitas kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kontribusi komunikasi organisasi dan perilaku kepemimpinan kepala sekolah, baik secara simultan maupun parsial dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Purwakarta.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Gambaran kondisi komunikasi organisasi di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta.
- b. Gambaran kondisi perilaku kepemimpinan kepala sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta.
- c. Gambaran kondisi efektifitas kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta.
- d. Menganalisis besarnya kontribusi antara komunikasi organisasi dengan efektifitas kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta.
- e. Menganalisis besarnya kontribusi antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan efektifitas kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta.
- f. Menganalisis besarnya kontribusi antara komunikasi organisasi dan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan efektifitas kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kondisi komunikasi organisasi, perilaku kepemimpinan kepala sekolah serta efektivitas kinerja sekolah pada SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para guru SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan efektivitas kinerja sekolah, sekaligus bahan masukan pula bagi Kepala Sekolah SMA Negeri untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinannya dan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan efektivitas kinerja di sekolahnya masing-masing

E. Struktur Organisasi

Penulisan tesis ini terdiri atas lima Bab.

Bab satu berisi tentang uraian pendahuluan, yang di dalamnya berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam tesis ini.

Bab dua tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Isi dari Bab ini adalah konsep atau teori dalam bidang dikaji, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, serta kerangka pemikiran dan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian.

Bab tiga berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, yang meliputi lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian, desain dan metode penelitian, definisi operasional dari tiap variabel disertai indikatornya, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab empat tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis dan tujuan penelitian, serta berisi pembahasan atau analisis temuan.

Bab lima tentang kesimpulan dan saran, menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian serta saran atau rekomendasi yang dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, serta kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.